

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Kamis, 13 Agustus 2020



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Liputan6.com	Kamis, 13 Agustus 2020	Kementerian PUPR Bedah Rumah 146 Hunian di Mempawah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan bantuan perbaikan rumah kepada 146 unit hunian di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Bantuan itu diberikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
2	Antarane.ws.com	Kamis, 13 Agustus 2020	Cegah banjir lagi, Kementerian PUPR bangun tanggul di Luwu Utara	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun tanggul sementara dalam rangka mencegah terulangnya banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
3	Timesindonesia.co.id	Kamis, 13 Agustus 2020	Cegah Banjir Bandang Luwu Utara Terulang, Kementerian PUPR RI bangun tanggul sementara	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) terus membantu penanganan darurat banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan selama masa penetapan tanggap darurat oleh Pemerintah Daerah 14 Juli-12 Agustus 2020 hingga pascabencana.
4	Antarane.ws.com	Kamis, 13 Agustus 2020	PP mulai bangun Bendungan Tamblang di Bali	PT PP (Persero) Tbk, BUMN konstruksi dan investasi di Indonesia mulai membangun salah satu Proyek Strategis Nasional, Bendungan Tamblang di Bali yang akan bermanfaat memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat di empat desa. Proyek yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali Kementerian PUPR dikerjakan dengan masa pelaksanaan proyek 48 bulan secara multiyears.
5	Antarane.ws.com	Kamis, 13 Agustus 2020	Gubernur Bali letakkan batu pertama di Bendungan Tamblang-Buleleng	Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Buleleng Putu Agus Suryadana dan Kepala BWS Bali Penida Maryadi utama, melakukan peletakan batu pertama Proyek Bendungan Tamblang di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali, Rabu.
6	Beritasatu.com	Kamis, 13 Agustus 2020	PTPP Groundbreaking Proyek Bendungan Tamblang	PT PP (Persero) Tbk atau PTPP, sebagai salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia, melaksanakan prosesi peletakan batu pertama (<i>groundbreaking ceremony</i>) pembangunan proyek Bendungan Tamblang, Rabu (12/8/2020).
7	Antarane.ws.com	Kamis, 13 Agustus 2020	Menteri PUPR targetkan konstruksi kampus UIII Depok tuntas Juni 2021	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Depok, Jawa Barat, tuntas pada Juni 2021.
8	Timesindonesia.co.id	Kamis, 13 Agustus 2020	Kementerian PUPR RI Lakukan Rapid Test 532 PKL, Petugas Kebersihan dan Petugas Parkir	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) bekerjasama dengan Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan menggelar Pojok Peduli Covid-19. Pada acara ini dilakukan Rapid Diagnostic Test atau rapid test bagi 532 Pedagang Kaki Lima (PKL), petugas parkir, dan petugas kebersihan di lingkungan kampus Kementerian PUPR, Rabu (12/8/2020), di Halaman Gedung Auditorium Kementerian PUPR RI.
9	Beritasatu.com	Kamis, 13 Agustus 2020	Kempupera Salurkan Program BSPS di Riau	Direktorat Jenderal Perumahan Kempupera melalui Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Riau melakukan serah terima hasil pembangunan rumah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 310 di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

10	Koran Tempo, Halaman Ekonomi Bisnis 2	Kamis, 13 Agustus 2020	Kontraktor Kecil Sulit Garap Proyek pada Masa Pandemi	<p>Para penyedia jasa konstruksi swasta mengaku kesulitan mengejar kontrak baru karena minimnya peluang proyek yang disediakan pemerintah pada masa pandemi. Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman, mengatakan penghematan pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, membuat aktivitas lelang lebih lesu dari tahun sebelumnya. "Lelangnya sedikit tapi ramai peminat. Banyak juga yang tidak kebagian pekerjaan," ucap dia kepada Tempo, kemarin.</p>
----	---------------------------------------	------------------------	---	--

Judul	Kontraktor Kecil Sulit Garap Proyek pada Masa Pandemi	Tanggal	13 Agustus 2020
Media	Koran Tempo, Halaman Ekonomi Bisnis 2		
Resume	Para penyedia jasa konstruksi swasta mengaku kesulitan mengejar kontrak baru karena minimnya peluang proyek yang disediakan pemerintah pada masa pandemi. Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman, mengatakan penghematan pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, membuat aktivitas lelang lebih lesu dari tahun sebelumnya. "Lelangnya sedikit tapi ramai peminat. Banyak juga yang tidak kebagian pekerjaan," ucap dia kepada Tempo, kemarin.		

EKONOMI DAN BISNIS

Kontraktor Kecil Sulit Garap Proyek pada Masa Pandemi

Pemerintah disarankan membuka program padat karya tunai untuk usaha kecil konstruksi.

EDISI, 13 AGUSTUS 2020



REPORTER: TEMPO



Pembangunan LRT di kawasan Kuningan, Jakarta, 20 Juli 2020. Tempo/Ferry Hartawan

JAKARTA – Para penyedia jasa konstruksi swasta mengaku kesulitan mengejar kontrak baru karena minimnya peluang proyek yang disediakan pemerintah pada masa pandemi. Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman, mengatakan penghematan pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, membuat aktivitas lelang lebih lesu dari tahun sebelumnya. “Lelangnya sedikit tapi ramai peminat. Banyak juga yang tidak kebagian pekerjaan,” ucap dia kepada *Tempo*, kemarin.

Menurut dia, Gapensi hanya memiliki 42 ribu anggota dari total 128 ribu pelaku usaha jasa konstruksi nasional. Sebanyak 87 persen dari total jumlah nasional itu merupakan kontraktor berkualifikasi usaha kecil. Bahkan banyak yang berupa industri mikro dan kecil alias UMKM. Sebanyak 10 persen merupakan kontraktor menengah dan sisa 3 persen adalah badan usaha besar, termasuk korporasi pelat merah.

“Badan usaha besar masih aman mendapat proyek, bahkan ada yang penunjukan,” tutur Andi. “Yang kesusahan adalah entitas kecil. Kadang satu lelang saja bisa diikuti 200 peserta.”

Kementerian Pekerjaan Umum memang tengah melonggarkan kegiatan kerja tahun anggaran 2020 untuk mendukung penanganan Covid-19. Dari pagu awal yang semula mencapai Rp 120,2 triliun, Kementerian harus merealokasikan Rp 44,5 triliun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Sisa Rp 75 triliun itu kini dipakai Kementerian untuk menyelesaikan pekerjaan yang krusial dan program padat karya tunai. Sementara itu, kontrak proyek yang belum genting diperpanjang atau menjadi *multi-years*.

Meski intensitas penyediaan proyek baru menurun, Andi meminta pelaksana lelang tak seketika membanting harga proyek, khususnya dalam tender yang diikuti kontraktor kecil. “Jangan berorientasi menawarkan harga murah karena nanti malah mengganggu kualitas pekerjaan,” kata dia. “Kontraktor kan juga butuh biaya besar untuk ikut lelang, apalagi saat masuk proses konstruksi.”

Direktur Eksekutif Gapensi DKI Jakarta, Setu Albertus, menyarankan Kementerian Pekerjaan Umum agar melibatkan kontraktor kecil dalam program padat karya tunai (PKT) pada 2020 sebesar Rp 11 triliun. Saat ini PKT hanya menyasar tenaga kerja perorangan maupun kelompok untuk pekerjaan yang tak membutuhkan sertifikasi khusus. “Kalau tujuannya untuk menyerap pekerja, kontraktor bisa membantu sebagai pihak ketiga,” tutur dia, kemarin. “Tenaga yang terserap juga lebih banyak.”

Kepala Komunikasi Publik Kementerian, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan program PKT bersifat swakelola, bukan kontraktual, untuk badan usaha. Contoh peserta PKT adalah perkumpulan petani yang menggarap padat karya imigrasi maupun pemilik rumah swadaya yang menggelar bedah rumah. “Porsi padat karya juga hanya 13 persen dari total pagu 2020. Masih ada alokasi hingga 80 persen untuk penyediaan paket baru melalui lelang,” ujar dia kepada *Tempo*.

Alih-alih disebut lesu, Endra mengatakan aktivitas lelang berkurang karena banyaknya proyek jangka pendek yang pengerjaannya diubah ke skema *multi-years*. “Kesannya seperti tidak banyak paket, tapi nanti pekerjaan *multi-years* selesai, tentu banyak lelang lagi.”

Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono memastikan lembaganya tetap ingin kontraktor swasta menengah dan kecil ikut terlibat dalam pembangunan nasional. Salah satu perangsangnya lewat Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2019 yang melarang badan usaha besar mengambil proyek bernilai di bawah Rp 100 miliar. “Sektor jasa konstruksi harus terus berjalan,” ucap dia melalui keterangan tertulis.

Hemat Anggaran, Seret Proyek

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memangkas pagu anggaran 2020 untuk kebutuhan mitigasi pandemi Covid-19. Meski berbagai metode penghematan membuat kegiatan lelang paket tahun ini lesu, Kementerian masih mengalokasikan anggaran untuk penyediaan paket pekerjaan infrastruktur yang bisa diserap semua kontraktor domestik, khususnya usaha kecil dan menengah. Ada juga alokasi untuk program padat karya tunai yang menysasar pekerja perorangan.

Berikut komposisi penghematan dan pengalokasian anggaran PUPR saat ini.

Perubahan komposisi anggaran akibat pandemi (Rp triliun)

- Pagu awal 2020: Rp 120,2 triliun
- Hasil penghematan untuk penanganan Covid-19: Rp 44,58 triliun
- Pagu sesuai dengan penghematan dan penyesuaian belanja: Rp 75,63 triliun

Skema penghematan Kementerian PUPR

- Penghematan biaya perjalanan dinas dan paket *meeting*.
- Penundaan paket kontraktual yang belum lelang.
- Perpanjangan pelaksanaan paket kegiatan tahun jamak (*multi-years*).
- Seleksi dan pengubahan paket kerja tahun tunggal (*single-year*) menjadi paket tahun jamak, termasuk paket kontraktual senilai maksimum Rp 100 miliar.
- Pemangkasan anggaran kegiatan non-fisik yang bisa ditunda, seperti survei dan penyusunan desain.

Pemanfaatan pagu

Total: Rp 75,6 triliun

- Program reguler infrastruktur (kontrak lelang, kontrak penunjukan, dan lain-lain): Rp 64,3 triliun
- Program padat karya tunai: Rp 11,3 triliun

SUMBER: WAWANCARA, KEMENTERIAN PUPR, GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI) | YOHANES PASKALIS